

## Rekapitulasi Hasil Audit Internal

No	Nama Kegiatan	Nomor LAP	Hasil Temuan
<b>Surat Tugas Nomor 79/ST/B.1/A.1/2023 (Audit Internal I)</b>			
1	Audit Internal atas Kegiatan Forum Internasional : Indonesia Pavillion di Davos	LAP - 546/INS/VII/2023	<p>1 Terdapat kelebihan pembayaran atas tiket pesawat, sewa kendaraan dan akomodasi</p> <p>2 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan kegiatan jasa lainnya kegiatan Forum Internasional : Indonesia Pavillion di Davos belum memadai</p> <p>3 Terdapat ketidaksesuaian 2 (dua) orang tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen pengadaan dengan dokumen pembayaran</p>
2	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	LAP - 481/INS/VII/2023	<p>1 Terdapat penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis yang tidak sesuai dengan daftar tenaga ahli/teknis pada dokumen penawaran dan addendum kontrak</p> <p>2 Terdapat pertanggungjawaban atas biaya transportasi bandara yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
3	Audit Internal atas Distribusi Bahan Bakar Khusus (BBK) Kendaraan Dinas T.A. 2022	LAP - 445/INS/VI/2023	<p>1 Perjanjian kerjasama antara Kementerian Investasi/BKPM dan Pertamina belum dilakukan addendum terkait penambahan kewajiban Pertamina untuk menyampaikan laporan detail transaksi pemakaian BBM oleh Kementerian Investasi/BKPM secara berkala/periodik</p> <p>2 Terdapat kendala dalam penggunaan voucher BBK yaitu SPBU Pertamina 31 yang letaknya tidak strategis sehingga mengakibatkan bila dalam keadaan mendesak pengguna voucher harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dan nanti nya voucher akan digunakan saat pembelian selanjutnya di SPBU Pertamina 31</p>
4	Audit Internal atas Kegiatan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Menteri (DOM) periode Januari - Maret 2023	LAP - 373/INS/V/2023	<p>1 Laporan Realisasi Anggaran atas penggunaan dana operasional menteri belum disampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM</p>
<b>Surat Tugas Nomor 111/ST/B.1/A.1/2023 (Audit Internal II)</b>			
1	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Belanja Jasa Lainnya Diseminasi Potensi Investasi dan Kebijakan Iklim PM	LAP - 671/INS/IX/2023	<p>1 Terdapat dokumen pertanggungjawaban honorarium narasumber, seminar kit, sewa kendaraan, penginapan dan biaya transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2 Terdapat pembayaran honorarium narasumber yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan</p> <p>3 Terdapat pengeluaran atas biaya transpot bandara yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan</p> <p>4 Terdapat pengeluaran atas biaya tiket pesawat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai secara kronologis</p> <p>5 Terdapat perbedaan antara rancangan kontrak dengan kontarak yang disepakati</p>
2	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Belanja Jasa Lainnya Diseminasi Hasil Kerjasama PM di Daerah	LAP - 670/INS/IX/2023	<p>1 Terdapat dokumen pertanggungjawaban honorarium narasumber, seminar kit, sewa kendaraan, penginapan dan biaya transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2 Terdapat pertanggungjawaban paket meeting fullday Eselon III yang nilainya melebihi SBM T.A. 2023</p> <p>3 Terdapat perbedaan nilai pembayaran termin I pada Berita Acara Pembayaran dengan dokumen kontrak</p>
3	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Jasa Lainnya Penempatan Tenaga Berbantuan Verifikasi Persyaratan	LAP - 672/INS/IX/2023	<p>1 KAK belum secara jelas dan lengkap mendeskripsikan ruang lingkup pekerjaan</p> <p>2 Rancangan kontrak yang diunggah pada dokumen tender tidak sesuai ketentuan</p>
4	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Managed Service Operasional Layanan Contact Center	LAP - 734/INS/X/2023	<p>1 Pengadaan sewa chatbot AI tidak sesuai dengan spesifikasi teknis</p> <p>2 Pergantian personel tidak sesuai ketentuan</p>
<b>Surat Tugas Nomor 158/B.1/A.1/2023 (Audit Internal III)</b>			
1	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Hilirisasi Investasi Strategis	LAP - 714/INS/IX/2023	<p>1 Penyedia belum menyusun program mutu/rencana mutu kontrak sebagaimana diatur dalam kontrak</p> <p>2 Terdapat perbedaan antara rancangan kontrak dengan kontarak yang disepakati</p> <p>3 Kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tercantum pada KAK</p> <p>4 Penggantian tenaga ahli tidak dilaksanakan sesuai ketentuan</p>
2	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kebijakan Penguatan Daya Saing	LAP - 715/INS/IX/2023	<p>1 Pemilihan jenis kontrak tidak konsisten dengan mekanisme pembayaran prestasi pekerjaan</p> <p>2 Laporan Keuangan yang disampaikan oleh penyedia tidak lengkap</p>
3	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Jasa Lainnya Pemberian NIB untuk UMK	LAP - 798/INS/X/2023	<p>1 Terdapat 2 (dua) materai yang memiliki nomor seri yang sama pada empat transaksi pada dokumen pertanggungjawaban</p> <p>2 Terdapat kelebihan pembayaran uang harian dan uang transportasi untuk Event Organizer pada kegiatan pemberian NIB kepada pelaku usaha di lokasi DKI Jakarta</p>
4	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Penilai Kinerja PTSP dan PPB Pemda serta PPB K/L	LAP - 770/INS/X/2023	<p>1 Terdapat Tenaga Ahli Supervisi atas nama Jusriadi yang waktu penugasannya beririsan dengan pelaksanaan kegiatan di Kedepatan Dalak sehingga honor yang tidak dapat dibayarkan</p> <p>2 Addendum Rencana Mutu Kontrak (RMK) belum dilakukan</p> <p>3 Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021</p>
<b>Surat Tugas Nomor 166/ST/B.1/A.1/2023 (Audit Internal IV)</b>			
1	Audit Internal atas Pekerjaan Pengadaan Laptop termasuk Microsoft Office	LAP - 882/INS/XI/2023	<p>1 Tim Audit belum dapat sepenuhnya meyakini bahwa pengadaan laptop termasuk microsoft office Kementerian Investasi/BKPM T.A. 2023 telah direncanakan secara efektif dan ekonomis</p> <p>2 Tim Audit tidak memperoleh akses audit ke Sistem e-purchasing</p> <p>3 Masih ditemukan dokumen pertanggungjawaban pengadaan yang belum tertib administrasi</p>
2	Audit Internal atas Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan dalam rangka mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)	LAP - 874/INS/XI/2023	<p>1 Tenaga Ahli tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak</p> <p>2 Tenaga translator dan tenaga pendukung tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak</p>
3	Audit Internal atas Belanja Perjalanan Dinas T.A. 2023	LAP - 852/INS/XI/2023	<p>1 Terdapat dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap secara administrasi seperti pembayaran hotel, transpot dan kegiatan yang belum lengkap secara asministrasi</p>
4	Audit Internal atas Belanja Perjalanan Dinas T.A. 2023	LAP - 853/INS/XI/2023	<p>1 Terdapat dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan seperti paket meeting</p> <p>2 Terdapat surat tugas yang mencantumkan penugasan diklat namun bukan merupakan kegiatan diklat karena merupakan kegiatan transfer knowledge yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan jasa konsultan</p>
5	Audit Internal atas Belanja Perjalanan Dinas T.A. 2023	LAP - 854/INS/XI/2023	<p>1 Terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai seperti format rincian tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat perbedaan tanda tangan, tidak bukti transportasi, tidak ada surat tugas</p> <p>2 Terdapat kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota</p>
<b>Surat Tugas Nomor 182/B.1/A.1/2023 (Audit Internal V)</b>			
1	Audit Internal atas Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha OSS Berbasis Risiko T.A. 2023	LAP - 974/INS/XII/2023	<p>1 Honorarium narasumber belum dipotong pajak penghasilan PPh Pasal 21 (final)</p> <p>2 Terdapat kelebihan pembayaran uang saldo fullday kepada panitia lokal</p> <p>3 Terdapat dokumen pertanggungjawaban paket meeting, seminar kit, sewa kendaraan dan akomodasi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
2	Audit Internal atas Dana Operasional Menteri bulan Juli s.d. September 2023	LAP - 927/INS/XII/2023	<p>1 Laporan Realisasi Anggaran atas penggunaan dana operasional menteri belum disampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM setiap bulan</p> <p>2 Terdapat ketidaksesuaian nilai/nominal pada laporan realisasi anggaran dengan kondisi sesungguhnya</p> <p>3 Terdapat kesalahan pencatatan administrasi realisasi anggaran (tidak sesuai bukti anggaran dan terdapat kesalahan penjumlahan saldo pada pencatatan rekapitulasi DOM)</p>
3	Audit Internal atas Kegiatan Fasilitasi Relokasi/Diversifikasi Geografis Perusahaan Asing ke Indonesia T.A. 2023	LAP - 910/INS/XII/2023	<p>1 Dokumen pertanggungjawaban kurang tertib administrasi</p> <p>2 Sertifikasi tenaga teknis harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK</p>

4	Audit Internal atas Kegiatan Konsolidasi Daerah dalam rangka Kegiatan Peningkatan PMDN T.A. 2023	LAP - 001/INS/I/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Seluruh biaya transportasi darat tidak dipertanggungjawabkan secara <i>at cost</i></li> <li>2 Terdapat pertanggungjawaban uang harian fulday yang nilainya melebihi standar biaya masukan (SBM) T.A. 2024</li> <li>3 Pertanggungjawaban taksi bandara dan honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan</li> <li>4 Pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>5 Pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>6 Terdapat pertanggungjawaban penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>7 Terdapat pertanggungjawaban belanja bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>8 Pertanggungjawaban sewa kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>9 Laporan yang disampaikan oleh penyedia tidak disertai dengan bukti yang lengkap</li> </ol>
6	Audit Internal atas Kegiatan Pengadaan Pengembangan Aplikasi OSS Berbasis Risiko T.A. 2023	LAP - 975/INS/XII/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat inkonsistensi jumlah Sub KAK pada pelaksanaan kontrak pengembangan aplikasi OSS berbasis risiko T.A. 2023</li> <li>2 Penilaian mutu dan kemajuan pekerjaan belum mempertimbangkan laporan dari konsultan pengawas</li> <li>3 Terdapat potensi beberapa Sub KAK tidak dapat diselesaikan tepat waktu</li> </ol>

#### AUDIT KINERJA

1	Efektifitas Peningkatan Kemitraan UKM dengan Usaha Besar Tahun 2022-2023 pada Direktorat Pemberdayaan Usaha	LAP - 851/INS/XI/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Direktorat Pemberdayaan Usaha belum sepenuhnya efektif dalam menyelenggarakan proses Manajemen Risiko yang menjadi bagian terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal</li> <li>2 Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja belum selaras dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2020-2024</li> <li>3 Persyaratan komitmen kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas mengenai persyaratan besaran nilai komitmen dan standar waktu persetujuan pengajuan kemitraan</li> <li>4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemitraan belum sepenuhnya efektif meningkatkan kepatuhan Usaha Besar dalam melaporkan kemitraan yang sudah terlaksana atau berkontrak</li> </ol>
---	---	-----------------------	--

#### AUDIT DANA DEKONSENTRASI

1	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Kepulauan Riau	LAP-98/INS/VIII/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen SPP/SPM, Surat Perjalanan Dinas (SPD) beserta dokumen pendukungnya belum ditandatangani PPK dan Pelaksana SPD</li> <li>2 Terdapat kesalahan penulisan pada dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas</li> <li>3 Pertanggungjawaban transportasi menuju bandara dan pelabuhan (pp) tidak dilaksanakan secara <i>at cost</i></li> <li>4 Terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan perintah tugas</li> <li>5 Terdapat pertanggungjawaban 30% (tiga puluh persen) penginapan yang tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat pengembalian</li> </ol>
2	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Banten	LAP-114/INS/VII/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat kelebihan pembayaran biaya transportasi dari Kota Serang ke Kota/Kabupaten sekitarnya sebesar</li> <li>2 Terdapat kesalahan pengisian format Surat Perjalanan Dinas (SPD)</li> </ol>
3	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Nusa Tenggara Timur	LAP-115/INS/VII/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat dokumen pertanggungjawaban transpot dalam kota yang belum dilengkapi dengan form bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam yang telah ditanda tangani oleh pihak tujuan/KPKN</li> <li>2 Sebagian besar bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas belum dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan Surat Perjalanan Dinas (SPD)</li> <li>3 Terdapat kelebihan pembayaran biaya transport untuk kegiatan perjalanan dinas dalam kota</li> <li>4 Terdapat pertanggungjawaban konsumsi pada kegiatan Rapat Kinerja DPMPTSP tanggal 13 Juni 2023 dan belum dikenakan PPn Pasal 22</li> <li>5 Terdapat pertanggungjawaban biaya penginapan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan PMA dan PMDNdi Kabupaten Manggarai Barat yang melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) T.A.2023</li> </ol>
4	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Sulawesi Tenggara	LAP-205/INS/III/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat lembar SPPD yang belum lengkap secara administrasi</li> <li>2 Sebagian besar bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas belum dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan Surat Perjalanan Dinas (SPD) rampung</li> <li>3 Terdapat pengajuan pencairan uang transport dan uang sakuk peserta tanpa disertai Surat Tugas</li> </ol>
5	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Sulawesi Tengah	LAP-246/INS/III/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Administrasi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum sepenuhnya tertib dan rapih</li> <li>2 Tidak dilakukan pencatatan atas mutasi barang persediaan/ATK</li> <li>3 Pengadaan konsumsi untuk kegiatan rapat tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ol>
6	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Maluku	LAP-253/INS/III/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat pembayaran belanja konsumsi kudapan rapat yang melebihi pagu Standar Biaya Masukan (SBM)</li> <li>2 Terdapat lembar pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan belanja pengiriman surat yang belum lengkap secara administrasi</li> </ol>
7	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Kalimantan Utara	LAP-254/INS/III/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pertanggungjawaban biaya transportasi tidak sesuai ketentuan</li> <li>2 Pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan</li> </ol>
8	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Maluku Utara	LAP-393/INS/V/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat kurang bayar kepada pelaksana perjalanan dinas atas biaya perjalanan dinas</li> <li>2 Terdapat pertanggungjawaban penginapan dan trnportasi tidak sesuai waktu penugasan di surat tugas</li> <li>3 Terdapat kesalahan pengisian format Surat Perjalanan Dinas (SPD)</li> </ol>
9	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Sulawesi Barat	LAP-425/INS/VI/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat pembelian konsumsi untuk kegiatan rapat internal di tanggal 30 Maret 2023 yang dikenakan pajak PPn pasal 23 sebesar 2%</li> <li>3 Terdapat kelebihan realisasi anggaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sampai dengan Bulan Agustus 2022 sebesar Rp6.434.700</li> <li>2 Terdapat pembelian konsumsi rapat internal yang tidak sesuai dengan PMK No. 83/PMK.02/2022</li> <li>3 Terdapat biaya transportasi pesawat yang dipertanggungjawabkan dibawah biaya riil yang dikeluarkan</li> <li>4 Belum ada buku persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk mencatat keluar dan masuk barang persediaan ATK</li> </ol>
10	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Bengkulu	LAP-446/INS/VI/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terdapat kelebihan pembayaran biaya taksi perjalanan dalam negeri</li> <li>2 Terdapat kelebihan pembayaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan satuan biaya uang harian kegiatan rapat</li> <li>3 Terdapat beberapa forum pertanggungjawaban kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan berlaku</li> </ol>
11	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Sulawesi Selatan	LAP-574/INS/VIII/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Form bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam tidak sesuai ketentuan</li> <li>2 Pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam lebih dari 1 (satu) hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan</li> <li>3 Kelebihan pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas</li> </ol>
12	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTSP Banten	LAP-016/INS/V/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pertanggungjawaban konsumsi rapat belum sesuai dengan ketentuan.</li> <li>2 Pencatatan barang persediaan belum sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3 Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota belum sesuai ketentuan.</li> <li>4 Terdapat pembayaran biaya transportasi darat perjalanan dinas belum sesuai ketentuan.</li> <li>5 Terdapat pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengelola SAI tidak sesuai dengan ketentuan.</li> </ol>
13	Audit Dana Dekonsentrasi DPMTPSP Sumatera Utara	LAP-022/INS/V/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar kota masih belum sesuai ketentuan.</li> <li>2 Pertanggungjawaban konsumsi rapat belum sesuai dengan ketentuan.</li> </ol>

			<p>3 Terdapat pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan pengelola SAI tidak sesuai dengan ketentuan.</p>
14	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Sulawesi Barat	LAP-/INS/V/2025	<p>1 Lebih Bayar Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam Sebesar Rp750.000,00</p> <p>2 Biaya taksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp51.500,00</p> <p>3 Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak wajar sebesar Rp270.000,00</p> <p>4 Dokumen pendukung pertanggungjawaban belum lengkap</p> <p>5 Tanggal pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan Surat Tugas</p>
15	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Provinsi Kepulauan Riau	LAP-026/INS/V/2025	<p>1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas</p> <p>2 Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp109.500,-</p>
16	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Jawa Barat	LAP-020/INS/V/2025	<p>1 Penetapan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang belum sesuai dengan ketentuan</p> <p>2 Pengadministrasian bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas belum dilengkapi sesuai dengan ketentuan.</p>
17	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Bengkulu	LAP-021/INS/V/2025	<p>1 Terdapat pembayaran pajak atas pembelian konsumsi kgiatan rapat yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>2 Pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD tidak sesuai dengan bukti pembayaran.</p> <p>3 Pelaksanaan pertanggungjawaban penginapan perjalanan dinas belum sesuai ketentuan.</p>
18	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Jawa Timur	LAP – 025/INS/V/2025	<p>Terdapat Pembayaran Belanja Barang yang Melebihi Ketentuan, yaitu Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Biasa Sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam rupiah).</p>
19	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Kalimantan Utara	LAP-028/INS/VI/2025	<p>1 Terdapat Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Biasa Yang Melebihi Ketentuan Sebesar Rp492.536,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).</p> <p>2 Terdapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan yang Bukti-Bukti Pertanggungjawabannya Belum Lengkap Sesuai Ketentuan</p>
20	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Maluku Utara	LAP-024/INS/V/2025	<p>1 Persediaan belum dicatat dalam buku manual persediaan sesuai ketentuan</p>
21	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Sulawesi Tengah	LAP-015/INS/V/2025	<p>1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum memiliki sertifikat keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>2 Persediaan belum dicatat dalam buku manual persediaan sesuai ketentuan.</p>
22	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Maluku	LAP-014/INS/V/2025	<p>1 Terdapat kelebihan pembayaran Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) pada periode Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli Tahun 2024 sebesar Rp802.000,00.</p> <p>2 Terdapat dokumen pertanggungjawaban sewa kendaraan yang belum dilengkapi dengan cap/stempel resmi dari perusahaan penyedia jasa.</p> <p>3 Terdapat Form Bukti Kehadiran perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>4 Terdapat pertanggungjawaban konsumsi rapat yang tidak sesuai dengan ketentuan.</p>
23	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Papua	LAP-027/INS/V/2025	<p>1 Terdapat kelebihan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Pengelola SAI pada periode Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024 sebesar Rp1.309.800,00.</p> <p>2 Terdapat pertanggungjawaban uang harian yang melebihi ketentuan sebesar Rp1.760.000,00.</p> <p>3 Terdapat dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum lengkap sesuai ketentuan.</p> <p>4 Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>5 Pengelola Anggaran Dekonsentrasi (Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPSPM) belum memiliki sertifikat kompetensi.</p>
24	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Nusa Tenggara Timur	LAP – 017/INS/V/2025	<p>1 Terdapat pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp500.000</p> <p>2 Pelaksanaan anggaran dana dekonsentrasi pada DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai ketentuan. (Ketidakateptan penggunaan akun)</p>
25	Audit Dana Dekonsentrasi DPMPTPSP Provinsi Sulawesi Selatan	LAP – 023 /INS/V/2025	<p>1 Terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas atas biaya reservasi kursi pesawat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>2 Pertanggungjawaban belanja konsumsi rapat tidak sesuai ketentuan. (Biaya konsumsi makan siang dan kudapan rapat tidak dipisah)</p>

#### AUDIT IIPC

1	Audit IIPC Abu Dhabi Semester I T.A. 2023	LAP-594/INS/VIII/2023	<p>1 Terdapat penandatanganan dokumen kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan</p> <p>2 Terdapat pertanggungjawaban belanja bahan untuk konsumsi rapat yang belum didukung dengan dokumen pendukung yang memadai</p> <p>3 Terdapat pengadaan paket meeting yang dilaksanakan tanpa melalui pejabat pengadaan</p> <p>4 Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap pada IIPC Abu Dhabi kurang memadai</p>
2	Audit IIPC London Semester I T.A. 2023	LAP-634/INS/VIII/2023	<p>1 Terdapat pertanggungjawaban belanja bahan untuk konsumsi rapat yang belum didukung dengan dokumen pendukung yang memadai</p> <p>2 Terdapat perikatan dengan pihak ketiga tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p> <p>3 Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap pada IIPC London kurang memadai</p> <p>4 Pengendalian Barang Persediaan pada IIPC London belum memadai</p>
3	Audit IIPC New York Semester I T.A. 2023	LAP-666/INS/IX/2023	<p>1 Terdapat pembebanan dan pencatatan biaya pelaksanaan kegiatan promosi yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>2 Pengendalian aset Barang Milik Negara (BMN) pada IIPC New York belum memadai</p>
4	Audit IIPC Seoul Periode Januari - September TA. 2022	LAP-678/INS/IX/2023	<p>1 Pertanggungjawaban belanja konsumsi rapat dan jamuan makan belum dilengkapi dengan undangan rapat dan daftar hadir/dokumentasi</p> <p>2 Biaya sewa kendaraan dipertanggungjawabkan sebagai kegiatan promosi ke dalam belanja barang non operasional lainnya</p> <p>3 Perjanjian sewa mobil operasional ditandatangani oleh Kepala Bidang Investasi KDEI dimana seharusnya kontrak tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal</p> <p>4 Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dilengkapi dengan laporan kegiatan dan dokumentasi sebagai bukti dukung pelaksanaan kegiatan</p> <p>5 Pembelian dan distribusi Alat Tulis Kantor (ATK) belum dicatat ke dalam buku persediaan sebagai upaya pemantauan pemakaian ATK</p> <p>6 Pembelian barang modal berupa Sony Voice Recorder dan Transcend 2TB Hard Disk dimasukkan ke dalam belanja barang non operasional lainnya</p>